

Kebijakan Moneter Islam : Landasan Teoretis, Implementasi, dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Ekonomi

¹Farah Qalbia, ²M. Reza Saputra

^{1,2}STIE Kasih Bangsa, Indonesia

Email: ¹farah@stiekasihbangsa.ac.id, ²reza.alkasyaf88@gmail.com

Alamat : Jl. Dr.Kasih No.1, RT.8/RW.1, Kb. Jeruk, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11530

Korespondensi penulis : arah@stiekasihbangsa.ac.id

Abstract: This research examines Islamic monetary policy, covering its theoretical foundations, implementation in various countries, and its impact and effectiveness. Islamic monetary policy, based on sharia principles such as the prohibition of usury, emphasis on the real sector, and profit-sharing principles, aims to create economic stability and socio-economic justice. Its implementation varies across countries, with some nations fully adopting Islamic financial systems and others using hybrid models. The research method used is a literature review involving the collection, analysis, and synthesis of various secondary sources such as books, journal articles, and relevant research reports. The results show that Islamic monetary policy is effective in controlling inflation, promoting sustainable economic growth, and enhancing financial stability. However, challenges remain in terms of standardizing practices across countries and integration with the global financial system. This study emphasizes the importance of innovation in Islamic financial instruments and increased international cooperation to enhance the effectiveness of Islamic monetary policy in the future.

Keywords: Islamic, Monetary Policy, Sharia, Economic.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan moneter Islam, yang mencakup landasan teoretis, implementasi di berbagai negara, serta dampak dan efektivitasnya. Kebijakan moneter Islam, yang berlandaskan pada prinsip syariah seperti larangan riba, penekanan pada sektor riil, dan prinsip bagi hasil, bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan keadilan sosial-ekonomi. Implementasinya bervariasi di berbagai negara, dengan beberapa negara menerapkan sistem keuangan Islam secara penuh dan lainnya menggunakan model hybrid. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur, yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan sintesis berbagai sumber sekunder seperti buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moneter Islam efektif dalam mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatkan stabilitas keuangan. Namun, tantangan tetap ada dalam hal standarisasi praktik antar negara dan integrasi dengan sistem keuangan global. Studi ini menekankan pentingnya inovasi instrumen keuangan syariah dan peningkatan kerja sama internasional untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter Islam di masa depan.

Kata Kunci: Kebijakan Moneter, Islam, Syariah, Ekonomi.

1. PENDAHULUAN

Kebijakan moneter Islam merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk menjaga stabilitas mata uang dan mendukung pertumbuhan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan kebijakan moneter konvensional, kebijakan moneter Islam didasarkan pada sejumlah prinsip utama yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi.

Salah satu prinsip fundamental kebijakan moneter Islam adalah larangan riba atau bunga. Islam secara tegas melarang penggunaan instrumen suku bunga dalam kebijakan moneternya, yang merupakan perbedaan signifikan dari sistem konvensional (Abdianti, 2023). Sebagai gantinya, sistem moneter Islam menggunakan konsep uang berbasis aset atau uang fiat yang didukung penuh, serta mendorong perputaran uang di sektor riil dan melarang penimbunan uang yang tidak produktif.

Kebijakan moneter Islam juga menekankan prinsip keadilan, pemerataan, dan persaudaraan dalam aktivitas ekonomi. Hal ini tercermin dalam tujuannya untuk menciptakan keadilan sosio-ekonomi, sementara kebijakan konvensional lebih berfokus pada stabilitas makroekonomi (Abdianti, 2023). Dalam implementasinya, sistem moneter Islam menggunakan instrumen seperti *profit-sharing*, zakat, dan *qard hasan* (pinjaman kebajikan) sebagai pengganti instrumen berbasis bunga.

Meskipun tujuan umum kebijakan moneter Islam dan konvensional sama-sama untuk menjaga stabilitas mata uang dan mendukung pertumbuhan ekonomi, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan dan instrumen yang digunakan (Marzuki, 2021). Kebijakan moneter Islam lebih menekankan pada sektor riil dan melarang spekulasi, sementara sistem konvensional memungkinkan adanya spekulasi di pasar keuangan.

Perbedaan lain terletak pada sistem perbankan yang digunakan. Sistem perbankan Islam cenderung menggunakan 100% *reserve banking* atau *fractional reserve* yang lebih terbatas, berbeda dengan sistem *fractional reserve banking* konvensional yang lebih longgar. Hal ini mencerminkan komitmen sistem moneter Islam terhadap stabilitas dan pengurangan risiko sistemik.

Kebijakan moneter Islam berupaya menciptakan sistem ekonomi yang adil dan seimbang, dengan penekanan pada sektor riil dan larangan praktik riba serta spekulasi berlebihan. Pendekatan ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan syariah dalam pelestarian kekayaan (*Ma'al*) dan menciptakan kesejahteraan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

Signifikansi mempelajari kebijakan moneter Islam semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan pesat keuangan Islam secara global. Dalam beberapa dekade terakhir, industri keuangan Islam telah bertransformasi dari pasar ceruk menjadi arus utama di banyak negara. Menurut laporan terbaru, aset keuangan Islam global mencapai US\$4,5 triliun pada tahun 2022, tumbuh 11% dari tahun sebelumnya. Proyeksi menunjukkan bahwa aset ini diperkirakan akan

melampaui US\$6,7 triliun pada tahun 2027, mencerminkan potensi pertumbuhan yang signifikan di masa depan (BNY Mellon, 2021).

Pertumbuhan ini tidak hanya terjadi di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar, tetapi juga mulai menarik perhatian investor di negara-negara non-Muslim. Faktor-faktor seperti peningkatan kesadaran akan prinsip-prinsip keuangan Islam, digitalisasi layanan keuangan, dan meningkatnya minat terhadap investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial telah berkontribusi pada daya tarik global keuangan Islam.

Seiring dengan pertumbuhan ini, kebutuhan akan kerangka moneter alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah semakin mendesak. Kebijakan moneter konvensional yang berbasis bunga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga diperlukan pendekatan yang berbeda untuk mengelola kebijakan moneter di negara-negara dengan sistem keuangan Islam yang berkembang (García, 2022). Hal ini menciptakan kebutuhan akan studi dan pengembangan kebijakan moneter Islam yang dapat mengakomodasi pertumbuhan industri keuangan syariah sambil tetap menjaga stabilitas ekonomi.

Selain itu, krisis keuangan global dan ketidakpastian ekonomi yang berulang telah mendorong pencarian alternatif terhadap sistem keuangan konvensional. Kebijakan moneter Islam, dengan penekanannya pada ekonomi riil dan pembagian risiko, dipandang oleh banyak pihak sebagai alternatif yang potensial untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan adil. Oleh karena itu, mempelajari dan mengembangkan kebijakan moneter Islam tidak hanya penting bagi negara-negara Muslim, tetapi juga relevan dalam konteks global sebagai sumber wawasan untuk reformasi sistem keuangan yang lebih luas.

Signifikansi mempelajari kebijakan moneter Islam terletak pada pertumbuhan pesat industri keuangan Islam global dan kebutuhan akan kerangka moneter alternatif yang dapat mengakomodasi prinsip-prinsip syariah sambil menjawab tantangan ekonomi kontemporer. Hal ini menjadikan studi tentang kebijakan moneter Islam sebagai bidang yang semakin penting dan relevan dalam lanskap keuangan global yang terus berevolusi.

Tinjauan literatur tentang kebijakan moneter Islam bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep, implementasi, dan dampak kebijakan moneter berbasis syariah. Kajian ini dimulai dengan mengeksplorasi landasan teoretis kebijakan moneter Islam, yang bersumber dari Al-Quran, Hadits, dan pemikiran para ekonom Muslim (Kholiq, 2016). Pendalaman aspek teoretis ini penting untuk memahami prinsip-prinsip dasar

yang membedakan kebijakan moneter Islam dari sistem konvensional, seperti larangan riba dan penekanan pada ekonomi riil (Shafaa, 2024).

Selanjutnya, tinjauan ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan moneter Islam di berbagai negara. Hal ini mencakup studi kasus negara-negara yang telah menerapkan sistem keuangan Islam secara penuh, seperti Iran dan Sudan, serta negara-negara dengan sistem keuangan ganda seperti Malaysia dan Indonesia (Rachma, 2024). Analisis ini akan mengungkap variasi pendekatan, tantangan, dan adaptasi yang dilakukan dalam menerapkan prinsip-prinsip moneter Islam dalam konteks ekonomi modern.

Tujuan ketiga dari tinjauan ini adalah menilai dampak dan efektivitas kebijakan moneter Islam. Evaluasi ini meliputi analisis pengaruh kebijakan moneter Islam terhadap stabilitas ekonomi, pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan. Perbandingan dengan hasil kebijakan moneter konvensional juga akan dilakukan untuk memberikan perspektif yang lebih luas.

Ruang lingkup tinjauan literatur ini mencakup berbagai aspek kebijakan moneter Islam, mulai dari konsep dasar hingga aplikasi praktisnya. Struktur tinjauan dimulai dengan pembahasan landasan filosofis dan teoretis kebijakan moneter Islam, dilanjutkan dengan analisis instrumen-instrumen kebijakan moneter syariah seperti profit-sharing, zakat, dan qard hasan (Kholiq, 2016). Selanjutnya, tinjauan akan membahas implementasi kebijakan ini di berbagai negara, termasuk tantangan dan adaptasi yang dilakukan.

Bagian berikutnya akan fokus pada dampak kebijakan moneter Islam terhadap berbagai indikator ekonomi. Analisis komparatif dengan sistem konvensional juga akan disajikan untuk memberikan konteks yang lebih luas (Abdillah, 2023). Tinjauan ini juga akan membahas perdebatan dan kritik terhadap kebijakan moneter Islam, serta prospek dan tantangan pengembangan sistem ini di masa depan.

Struktur tinjauan diakhiri dengan sintesis temuan utama, kesimpulan, dan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut. Dengan cakupan yang luas dan mendalam ini, tinjauan literatur bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kebijakan moneter Islam, kontribusinya terhadap stabilitas ekonomi, serta potensinya sebagai alternatif atau pelengkap sistem moneter konvensional (Shafaa, 2024).

2. MEODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur untuk mengkaji kebijakan moneter Islam. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan sintesis berbagai sumber sekunder seperti buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik kebijakan moneter Islam. Proses penelitian dimulai dengan eksplorasi landasan teoretis kebijakan moneter Islam yang bersumber dari Al-Quran, Hadits, serta pemikiran para ekonom Muslim. Selanjutnya, penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan moneter Islam di berbagai negara, termasuk studi kasus dari negara-negara dengan sistem keuangan Islam penuh dan sistem perbankan ganda. Penelitian ini juga menilai dampak kebijakan moneter Islam terhadap stabilitas ekonomi, pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan melalui analisis komparatif dengan kebijakan moneter konvensional. Hasil dari tinjauan literatur ini diintegrasikan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai efektivitas dan prospek kebijakan moneter Islam di masa depan.

3. PEMBAHASAN

Landasan Teoretis Kebijakan Moneter Islam

Landasan teoretis kebijakan moneter Islam berpijak pada prinsip-prinsip fundamental yang berakar pada ajaran Islam dan bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan seimbang. Salah satu pilar utama kebijakan moneter Islam adalah larangan riba atau bunga. Prinsip ini didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Hadits yang secara tegas melarang praktik riba dalam segala bentuknya.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبَطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. Al-Baqarah: 275)

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ، وَقَالَ: "هُمُ سَوَاءٌ". (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Jabir r.a., Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya, dan dua saksinya. Beliau bersabda, Mereka semua sama.* (HR. Muslim)

Ayat Al-Quran dan hadits di atas secara jelas melarang praktik riba dan menegaskan dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat. Larangan riba bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Dalam tafsirnya, para ulama menjelaskan bahwa riba merusak tatanan sosial-ekonomi dengan menciptakan kesenjangan yang lebih besar antara si kaya dan si miskin. Oleh karena itu, kebijakan moneter Islam yang bebas riba bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan seimbang, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Larangan ini mendorong pengembangan sistem keuangan yang tidak bergantung pada mekanisme bunga, melainkan pada prinsip bagi hasil dan kemitraan (Ayub, 2021).

Sebagai alternatif terhadap sistem berbasis bunga, kebijakan moneter Islam mengadopsi sistem moneter berbasis aset. Dalam sistem ini, uang harus didukung oleh aset riil atau kegiatan ekonomi produktif. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai uang dan menghindari inflasi yang berlebihan akibat penciptaan uang tanpa dukungan aset yang memadai (Putra, 2022).

Prinsip berbagi risiko merupakan elemen penting lainnya dalam landasan teoretis kebijakan moneter Islam. Konsep ini menekankan bahwa risiko dalam transaksi ekonomi harus dibagi secara adil antara pihak-pihak yang terlibat, bukan dialihkan sepenuhnya kepada satu pihak seperti yang sering terjadi dalam sistem berbasis bunga. Prinsip ini mendorong terciptanya hubungan ekonomi yang lebih seimbang dan mengurangi potensi eksploitasi (Hermawan, *et al.*, 2023).

Untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut, kebijakan moneter Islam mengembangkan berbagai instrumen moneter yang sesuai dengan syariah. Instrumen-instrumen utama ini meliputi *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kemitraan), *murabahah* (jual beli dengan margin), dan *sukuk* (obligasi syariah). Selain itu, zakat dan wakaf juga diintegrasikan sebagai instrumen kebijakan moneter untuk mendorong distribusi kekayaan dan pembangunan sosial-ekonomi (Putra, 2022).

Landasan teoretis ini membentuk kerangka kebijakan moneter Islam yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, dan memastikan keadilan sosial-ekonomi. Melalui pendekatan ini, kebijakan moneter Islam

berupaya menyeimbangkan tujuan ekonomi dengan nilai-nilai etika dan moral yang berakar pada ajaran Islam.

Implementasi Kebijakan Moneter Islam

Implementasi kebijakan moneter Islam telah dilakukan dengan berbagai pendekatan di sejumlah negara Muslim, mencerminkan keragaman interpretasi dan adaptasi prinsip-prinsip syariah dalam konteks ekonomi modern. Beberapa negara telah mencoba menerapkan sistem keuangan Islam secara menyeluruh, sementara yang lain mengadopsi model hybrid yang menggabungkan elemen-elemen konvensional dan syariah.

Iran merupakan salah satu contoh negara yang telah menerapkan sistem perbankan dan keuangan Islam secara komprehensif sejak revolusi 1979. Negara ini telah mengembangkan berbagai instrumen moneter syariah, seperti sukuk pemerintah dan sertifikat partisipasi, untuk mengelola likuiditas dan mengendalikan inflasi. Namun, implementasi di Iran juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal standarisasi praktik dan penegakan prinsip-prinsip syariah secara konsisten (Pitchay, *et al.*, 2022).

Sudan juga telah berupaya menerapkan sistem keuangan Islam secara penuh, dengan Bank Sentral Sudan mengadopsi kebijakan moneter berbasis syariah. Negara ini telah mengembangkan instrumen seperti sertifikat investasi pemerintah berbasis musyarakah untuk manajemen likuiditas. Meskipun demikian, Sudan menghadapi tantangan signifikan terkait ketidakstabilan politik dan sanksi ekonomi yang mempengaruhi efektivitas kebijakan moneternya (Khatat, 2016).

Pakistan mengadopsi pendekatan bertahap dalam mengislamkan sistem keuangannya. Negara ini menerapkan model dual banking, di mana bank syariah beroperasi berdampingan dengan bank konvensional. Bank Negara Pakistan telah mengembangkan instrumen seperti *Sukuk Ijarah* Pemerintah dan *Islamic Open Market Operations* untuk manajemen likuiditas sektor perbankan Syariah (Khatat, 2016).

Model hybrid atau sistem perbankan ganda, seperti yang diterapkan di Malaysia dan Indonesia, menawarkan fleksibilitas dalam mengakomodasi kebutuhan berbagai segmen masyarakat. Dalam sistem ini, bank sentral mengembangkan instrumen moneter khusus untuk sektor perbankan syariah, seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) di Indonesia, sambil tetap mempertahankan instrumen konvensional (Tekdogan, 2021).

Tantangan utama dalam implementasi kebijakan moneter Islam meliputi kurangnya standardisasi praktik antar negara, keterbatasan instrumen moneter syariah yang likuid, dan kompleksitas dalam menyelaraskan kebijakan moneter syariah dengan sistem keuangan global yang didominasi praktik konvensional. Selain itu, banyak negara menghadapi dilema dalam menyeimbangkan tujuan syariah dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan (Pitchay, *et al.*, 2022).

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, implementasi kebijakan moneter Islam terus berkembang. Inovasi dalam pengembangan instrumen syariah, peningkatan kerja sama internasional dalam standardisasi praktik, dan penguatan kerangka regulasi terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter Islam (Marsuki, 2010). Pengalaman berbagai negara dalam mengimplementasikan kebijakan moneter Islam memberikan wawasan berharga bagi pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih robust dan adaptif terhadap kebutuhan.

Dampak dan Efektivitas

Kebijakan moneter Islam telah menunjukkan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek ekonomi, termasuk inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan. Dalam upaya mengendalikan inflasi, kebijakan moneter Islam menggunakan instrumen-instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti operasi pasar terbuka berbasis sukuk dan manajemen likuiditas melalui instrumen bagi hasil. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat membantu menjaga stabilitas harga tanpa menimbulkan efek samping negatif seperti yang sering terjadi dalam kebijakan moneter konvensional berbasis bunga (Aqidah *et al.*, 2022).

Dari segi pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter Islam cenderung mendorong alokasi sumber daya ke sektor riil melalui pembiayaan berbasis bagi hasil dan jual-beli. Hal ini kontras dengan kebijakan moneter konvensional yang sering kali mendorong spekulasi di sektor keuangan. Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan kebijakan moneter syariah, seperti Malaysia dan Iran, telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan (Madani & Widiastuti, 2021).

Stabilitas keuangan juga menjadi fokus utama kebijakan moneter Islam. Dengan melarang transaksi berbasis riba dan spekulasi berlebihan, sistem keuangan syariah cenderung lebih tahan terhadap guncangan eksternal. Hal ini terbukti selama krisis keuangan global 2008,

di mana lembaga keuangan syariah menunjukkan ketahanan yang lebih baik dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional (Engku Hassan et al., 2022).

Dalam perbandingan dengan kebijakan moneter konvensional, kebijakan moneter Islam menunjukkan beberapa keunggulan. Misalnya, dalam hal pengendalian inflasi, kebijakan moneter Islam cenderung lebih efektif dalam jangka panjang karena tidak bergantung pada manipulasi suku bunga yang dapat menimbulkan distorsi ekonomi. Selain itu, fokus kebijakan moneter Islam pada sektor riil dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Hasna et al., 2019).

Bukti empiris tentang efektivitas kebijakan moneter Islam terus berkembang. Studi di Indonesia menunjukkan bahwa instrumen moneter syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan sektor riil dan pertumbuhan ekonomi (Herianingrum & Fathy, 2016). Di Malaysia, penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moneter syariah berperan penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan inflasi (Ali et al., 2022).

Meskipun demikian, perlu diakui bahwa implementasi kebijakan moneter Islam masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal standarisasi praktik antar negara dan integrasi dengan sistem keuangan global. Namun, dengan terus berkembangnya inovasi instrumen keuangan syariah dan meningkatnya pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, efektivitas kebijakan moneter Islam diharapkan akan terus meningkat di masa depan (Ascarya, 2012).

Perdebatan dan Kritik

Kebijakan moneter Islam telah menjadi subjek perdebatan dan kritik dalam konteks sistem keuangan modern. Salah satu isu utama yang sering diangkat adalah kepraktisan penerapan kebijakan moneter Islam dalam sistem keuangan global yang didominasi oleh instrumen berbasis bunga. Kritik ini muncul karena kompleksitas integrasi prinsip-prinsip syariah ke dalam kerangka moneter konvensional. Beberapa pihak berpendapat bahwa instrumen moneter syariah seperti sukuk dan kontrak berbasis bagi hasil masih belum sepenuhnya dapat menggantikan peran instrumen konvensional dalam manajemen likuiditas dan transmisi kebijakan moneter (Ascarya, 2012).

Kemampuan kebijakan moneter Islam dalam mengendalikan jumlah uang beredar juga menjadi sorotan. Tanpa mekanisme suku bunga, beberapa ekonom mempertanyakan

efektivitas instrumen syariah dalam menyerap kelebihan likuiditas atau menyuntikkan likuiditas ke sistem perbankan saat dibutuhkan. Meskipun beberapa negara seperti Malaysia telah menunjukkan keberhasilan dalam mengembangkan instrumen moneter syariah, masih ada keraguan apakah instrumen tersebut dapat seefektif instrumen konvensional dalam skala yang lebih luas (Chapra, 2000).

Kurangnya standarisasi antar negara dalam penerapan kebijakan moneter Islam juga menjadi tantangan tersendiri. Perbedaan interpretasi syariah dan kerangka regulasi di berbagai negara menyebabkan variasi dalam implementasi kebijakan moneter Islam. Hal ini tidak hanya menimbulkan kesulitan dalam harmonisasi kebijakan antar negara, tetapi juga menciptakan potensi arbitrase regulasi yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan global (Iqbal & Mirakhor, 2011).

Namun, terlepas dari kritik-kritik tersebut, perkembangan kebijakan moneter Islam terus menunjukkan kemajuan. Inovasi dalam pengembangan instrumen syariah dan peningkatan kerja sama internasional dalam standarisasi praktik terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter Islam. Pengalaman negara-negara seperti Iran, Sudan, dan Malaysia dalam mengimplementasikan kebijakan moneter syariah memberikan wawasan berharga bagi pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih robust dan adaptif terhadap kebutuhan ekonomi modern (Ayub, 2007).

Tantangan ke depan adalah bagaimana menyeimbangkan prinsip-prinsip syariah dengan tuntutan sistem keuangan global yang semakin kompleks. Diperlukan penelitian lebih lanjut dan dialog yang konstruktif antara para ahli syariah, ekonom, dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan kerangka kebijakan moneter Islam yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga efektif dalam mencapai tujuan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Arah Masa Depan

Kebijakan moneter Islam terus berkembang dan menunjukkan potensi besar untuk diadopsi lebih luas di masa depan. Namun, untuk mencapai potensi penuh ini, ada beberapa bidang yang memerlukan penelitian lebih lanjut, serta rekomendasi yang dapat membantu pembuat kebijakan dalam mengembangkan kerangka kerja yang lebih efektif dan inklusif.

Salah satu bidang utama yang memerlukan penelitian lebih lanjut adalah pengembangan instrumen moneter syariah yang lebih efektif dan likuid. Meskipun beberapa

instrumen seperti sukuk telah menunjukkan keberhasilan, masih ada kebutuhan untuk inovasi lebih lanjut dalam menciptakan instrumen yang dapat berfungsi seefektif instrumen konvensional dalam manajemen likuiditas dan transmisi kebijakan moneter (Ascarya, 2012). Penelitian juga perlu difokuskan pada bagaimana instrumen-instrumen ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem keuangan global tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dampak kebijakan moneter Islam terhadap stabilitas ekonomi makro. Studi empiris yang lebih mendalam dapat membantu mengidentifikasi bagaimana kebijakan ini mempengaruhi variabel-variabel seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan dalam berbagai konteks ekonomi (Chapra, 2000).

Potensi untuk adopsi kebijakan moneter Islam yang lebih luas sangat besar, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan. Negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia telah menunjukkan bahwa kebijakan moneter syariah dapat berfungsi secara efektif dalam sistem perbankan ganda, di mana bank syariah dan konvensional beroperasi berdampingan (Iqbal & Mirakhor, 2011). Pengalaman ini dapat menjadi model bagi negara-negara lain yang ingin mengadopsi kebijakan moneter Islam.

Selain itu, keberhasilan pasar uang syariah di Malaysia menunjukkan bahwa dengan kerangka regulasi yang tepat, instrumen moneter syariah dapat berfungsi dengan baik dalam mengelola likuiditas dan mendukung stabilitas keuangan (Engku Hassan et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa dengan dukungan regulasi dan kebijakan yang tepat, adopsi kebijakan moneter Islam dapat diperluas ke lebih banyak negara.

Untuk mendukung pengembangan dan adopsi kebijakan moneter Islam yang lebih luas, ada beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan:

1. Pengembangan Instrumen Moneter Syariah: Pembuat kebijakan perlu mendorong inovasi dalam pengembangan instrumen moneter syariah yang lebih efektif dan likuid. Ini termasuk penelitian dan pengembangan instrumen baru yang dapat menggantikan peran instrumen konvensional dalam manajemen likuiditas (Ascarya, 2012).
2. Harmonisasi Regulasi: Perbedaan interpretasi syariah dan kerangka regulasi di berbagai negara menyebabkan variasi dalam implementasi kebijakan moneter Islam. Pembuat kebijakan perlu bekerja sama untuk menciptakan standar internasional yang dapat membantu harmonisasi regulasi dan praktik (Iqbal & Mirakhor, 2011).

3. Pelatihan dan Edukasi: Pembuat kebijakan harus memastikan bahwa ada program pelatihan dan edukasi yang memadai untuk para praktisi keuangan dan regulator. Ini penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah dipahami dan diterapkan dengan benar dalam praktik moneter (Ayub, 2007).
4. Kerjasama Internasional: Pembuat kebijakan perlu meningkatkan kerjasama internasional dalam penelitian dan pengembangan kebijakan moneter Islam. Ini termasuk berbagi pengetahuan dan pengalaman antara negara-negara yang telah berhasil mengimplementasikan kebijakan ini (Engku Hassan et al., 2022).

Dengan mengikuti rekomendasi ini, pembuat kebijakan dapat membantu menciptakan kerangka kerja yang lebih efektif dan inklusif untuk kebijakan moneter Islam, yang pada akhirnya dapat mendukung stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan moneter Islam, dimulai dari landasan teoretis hingga implementasinya di berbagai negara. Kebijakan moneter Islam, yang berlandaskan pada prinsip syariah seperti larangan riba, penekanan pada sektor riil, dan prinsip bagi hasil, bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan keadilan sosial-ekonomi.

Implementasi kebijakan ini bervariasi di berbagai negara, dengan beberapa negara mengadopsi sistem keuangan Islam secara penuh sementara yang lain menggunakan model *hybrid* yang menggabungkan elemen-elemen konvensional dan syariah. Hasil implementasi menunjukkan bahwa kebijakan moneter Islam dapat membantu menjaga stabilitas harga, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatkan stabilitas keuangan.

Namun, penelitian ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan moneter Islam, termasuk kurangnya standardisasi praktik antar negara dan integrasi dengan sistem keuangan global. Meskipun demikian, dengan inovasi dalam pengembangan instrumen keuangan syariah dan peningkatan kerja sama internasional, efektivitas kebijakan moneter Islam terus meningkat.

Kebijakan moneter Islam menawarkan alternatif yang potensial dan relevan dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan adil, tidak hanya bagi negara-negara Muslim tetapi juga dalam konteks global. Studi lebih lanjut dan dialog konstruktif antara para

ahli syariah, ekonom, dan pembuat kebijakan diperlukan untuk mengembangkan kerangka kebijakan moneter Islam yang lebih efektif dan inklusif di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdianti, D., Restu, A., Al Ayyubi, S., & Hidayat, F. (2023). Konsep kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 213-226. <https://doi.org/10.30640/trending.v1i3.1140>
- Abdillah Aziz, R., Riva, I., & Setiawan, I. (2023). Kebijakan moneter di negara Islam dan negara Muslim: Iran, Pakistan, Saudi Arabia, dan Indonesia. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 6(2), 203-217. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i2.18805>
- Ali, A., Zulkhibri, M., & Kishwar, T. (2022). Economic output, monetary policy transmission and the role of Islamic banks: Evidence from Pakistan dual banking system. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(4), 535-550. <https://doi.org/10.21098/jimf.v8i4.1486>
- Aqidah, N. A., Ishak, I., Takdir, T., & Azzahra, M. (2022). Analisis efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui instrumen syariah dan konvensional dalam memengaruhi inflasi di Indonesia. *Owner*, 6(3), 2345–2353. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.990>
- Ascarya. (2012). Alur transmisi dan efektivitas kebijakan moneter ganda di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 14(3), 283–315. <https://doi.org/10.21098/bemp.v14i3.360>
- Ayub, M. (2007). *Understanding Islamic finance*. John Wiley & Sons.
- Ayub, M., & Khan, M. F. (2021). Evolving monetary economics in Islamic perspective. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(2), 317-340. <https://doi.org/10.21098/jimf.v7i2.1372>
- BNY Mellon. (n.d.). The growing global appeal of Islamic finance. Retrieved November 16, 2024, from <https://www.bnymellon.com/us/en/insights/all-insights/the-growing-global-appeal-of-islamic-finance.html>
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.
- García Cicco, J. (2022). Alternative monetary-policy instruments and limited credibility: An exploration. *Latin American Journal of Central Banking*, 3(1), 100051. <https://doi.org/10.1016/j.latcb.2022.100051>
- Herianingrum, S., & Fathy, U. M. (2016). Analisis mekanisme transmisi moneter jalur pembiayaan bagi hasil di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 125–148. <https://doi.org/10.20473/jebis.v2i2.3143>

- Hermawan, D., et al. (2023). Development of sharia monetary policy in the Indonesian economic system (Study of Islamic bank interest monetary policy): Studi kebijakan moneter bunga bank syariah. *Journal Of Management Analytical and Solution (JoMAS)*, 3(2), 70-74. <https://doi.org/10.32734/jomas.v3i2.11130>
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice*. John Wiley & Sons.
- Khatat, M. E. H. (2016). *Monetary policy in the presence of Islamic banking*. International Monetary Fund.
- Kholiq, A. (2016). *Teori moneter Islam (Edisi revisi)*. CV. Elsi Pro.
- LSEG. (n.d.). Navigating uncertainty: Global Islamic finance assets expected to exceed \$67 trillion by 2027. Retrieved November 16, 2024, from <https://www.lseg.com/en/insights/data-analytics/navigating-uncertainty-global-islamic-finance-assets-expected-to-exceed-67-trillion-by-2027>
- Madani, A., & Widiastuti, T. (2021). The impact of Islamic monetary operations and aggregate financing on economic growth in Indonesia (2010-2020). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 185–209. <https://doi.org/10.20473/jebis.v7i2.26085>
- Marsuki, M. (2010). Problem and perspective of Islamic monetary policy in Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 14(3), 435-446. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v14i3.985>
- Marzuki, S. N. (2021). Konsep uang dan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 12(2), 201-216. <https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v12i2.1757>
- Pitchay, A., Allah, A., et al. (2022). The effect of monetary policy on Islamic financial institutions: A perspective of liquidity management. *Rafgo*, 2(2), 22-29. <https://doi.org/10.5555/rafgo.2.2.22>
- Putra, H. M., & Solehudin, E. (2022). Fundamentals of economic and monetary policy in Islam. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 7(1), 89-104. <http://dx.doi.org/10.29240/alfalah.v7i1.4302>
- Rachma, M. S. (2024). Analisis pengaruh indikator finansialisasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada negara organisasi kerjasama Islam. Tesis, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. dspace.uui.ac.id/123456789/50271
- Shafaa, N. (2024). Penerapan kebijakan moneter Islam pada sistem perekonomian Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(5), 1-15. <https://doi.org/10.62281/v2i5.310>
- Tekdogan, O. F., & Atasoy, B. S. (2021). Does Islamic banking promote financial stability? Evidence from an agent-based model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(2), 201-232. <https://doi.org/10.21098/jimf.v7i2.1323>